

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL
HUTAN TANPA IZIN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla)

SKRIPSI

Oleh

Bagus Riyan Ardiyansyah

NIM. C93214087



Universitas Islam Negeri SunanAmpel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Riyan Ardiyansyah

NIM : C93214087

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan
Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018

Yang menandatangani



Bagus Riyan Ardiyansyah

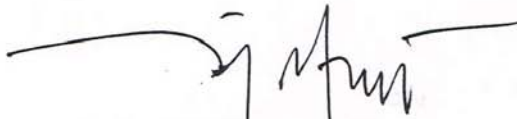
NIM. C93214073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bagus Riyan Ardiyansyah NIM C93214087 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2018

Pembimbing Skripsi,



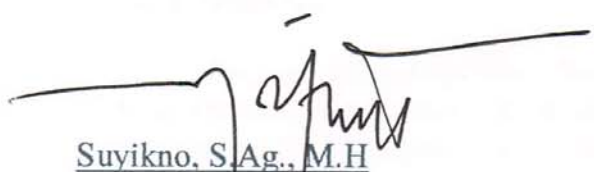
Suyikno, S.Ag., M.H
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bagus Riyan Ardiyansyah NIM C93214087 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 01 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Syariah.

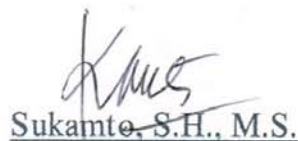
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



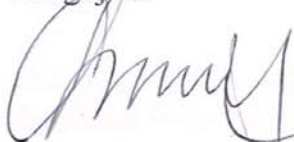
Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP 197307052011011001

Penguji III



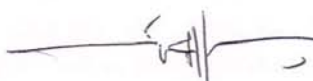
Sukanto, S.H., M.S.
NIP 196003121999031001

Penguji II



Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP 196006201989032001

Penguji IV



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP 197908012011012003

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bagus Riyan Ardiyansyah
NIM : C93214087
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : ryanbagus78@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana

Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(Bagus Riyan Ardiyansyah)
nama terang dan tanda tangan

berhenti dan hanya bertemu dengan saksi Yahman Bin Kasiran, saat itu terdakwa yang bertugas mengendarai mobil sedang pergi buang air besar dan selesai buang air besar langsung melarikan diri ketika melihat ada dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang disopiri oleh terdakwa yang memuat dan mengangkut kayu balok berukuran 2 meter sebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpal berwarna biru, saksi Yahman Bin Kasiran saat itu menjelaskan tentang jenis kayu dan berasal dari mana kayu yang berada dimobil tersebut dan dijelaskan oleh saksi Yahman Bin Kasiran bahwa kayu tersebut adalah kayu jenis Sono Keling milik Topik (DPO) yang berasal dari hutanKawasan kemudian saksi Bayu Saputra menanyakan izin kayu tersebut dan saksi Yahman Bin Kasiran tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan kayu tersebut sehingga saksi Yahman Bin Kasiran beserta barang bukti langsung diamankan, kemudian saksi Bayu Saputra dan timbersama dengan saksi Nasir selaku Ketua Gapoktan langsung mendatangi hutan kawasan Register 19 di wilayah umbulan limbungan resort Way Limadan ditemukan adanya tunggul Pohon Sono Keling bekas tebangan.

Bahwa kayu balok berukuran 2 meter sebanyak 16 batang diangkut dari lokasi penebangan dengan menggunakan ojek lalu di pidahkan ke bak mobil, kemudian terdakwa dan saksi Yahman Bin Kasiran diperintah oleh Topik (DPO) untuk membawa kayu tersebut ke Pul yang berada di bawah

- melakukan penangkapan terhadap saksi Yahman bin Kasiran karena bersama-sama dengan terdakwa telah mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
- b. Bahwa penangkapan terjadi bermula saksi bersama anggota lainnya sedang melakukan patrol, melihat 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam BE 9546AQ berhenti ditengah jalan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Yahman bin Kasiran, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan kayu balok berukuran 2m sebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpal berwarna biru.
- c. Bahwa penangkapan terjadi bermula saksi bersama anggota lainnya sedang melakukan patrol, melihat 1 (satu) unit mobil L300 berwarna hitam BE 9546AQ berhenti ditengah jalan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Yahman bin Kasiran, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan kayu balok berukuran 2m sebanyak 16 batang yang berada dibak mobil dengan ditutupi terpal berwarna biru.
- d. Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Yahman bin Kasiran jenis kayu dan berasal dari mana kayu yang berada di mobil tersebut dan dijelaskan oleh saksi Yahman bin Kasiran bahwa kayu tersebut adalah

- kayu jenis SonoKeling milik Topik (DPO) yang berasal dari hutan Kawasan.
- e. Bahwa pada saat saksi menanyakan izin kayu tersebut, saksi Yahman binKasiran tidak dapat menunjukkan izin sehubungan tangan kayu tersebutsehingga langsung dilakukan penangkapan.
 - f. Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa sedang buang air besarsehingga berhasil melarikan diri.
 - g. Bahwa saksi dan tim bersama dengan saksi Nasir selaku Ketua Gapoktan langsung mendatangi hutan kawasan Register 19 di wilayah umbulanlimbungan resort Way Lima dan ditemukan adanya tunggul Pohon Sono Keling bekas tebangan.
 - h. Bahwa terhadap barang bukti saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unitKendaraan L300 warna hitam Nopol BE 9546 AQ adalah kenadaraan yangdipergunakan terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kawasan berupa kayutanpa izin 16 (enam belas) potongan kayu jenis sono keling adalah kayuyang diangkut oleh terdakwa bersama saksi Yahman bin Kasiran yangberasal dari hutan kawasan; 1 (satu) lembar terpal warna biru adalah alatyang dugunakan terdakwa untuk menutupi 16 (enam belas) potongan kayujenis sono keling 1 (satu) buah HP merek Nokia C3 warna putih dan 1(satu) buah HP Nokia warna merah muda merupakan alat komunikasi miliksaksi Yahman

Bahwa Pasal 12 huruf d Undang-undang No 18 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Adi Syafaat Bin Harisman yang memiliki keahlian di bidang pemetaan Lokasi (koordinat) berdasarkan batas kawasan hutan, menerangkan bahwa Lokasi penebangan tersebut atau pengambilan kayu jenis sono keling yang diangkut terdakwa masuk ke dalam hutan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman Reg 19, yang diketahui ahli dari telaah hasil pengambilan koordinat TKP di lokasi penebangan dan lokasi penebangan tersebut masuk dalam hutan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman Reg 19 dari peta tata batas kawasan hutan Tahura Wan Abdurahman dengan titik koordinat $05^{\circ} 27' 38,9''$ LS $105^{\circ} 5' 08,8''$ BT dan Titik Koordinat PAL Batas THR 22; $05^{\circ} 27' 18,2''$ LS $105^{\circ} 4' 51,6''$ BT dengan jarak datar antara dua titik koordinat yang diambil tersebut adalah 826 meter lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan register 19.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli SUMARDI, S. Hut, MM BIN SUKARTO, menerangkan bahwa Yang berhak mengeluarkan ijin adalah Menteri Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan,

Saputra, saksi Ris Trifelly yang merupakan anggota POLRI, sedang melaksanakan Patroli melihat 1 (satu) unit Mobil L300 berwarna hitam BE 9546 AQ sedang berhenti yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Yahman bin Kasiran, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ditemukan kayu balok berukuran 2m sebanyak 16 batang yang berada di bak mobil dengan ditutupi terpal berwarna biru, kemudian ditanya jenis kayu dan berasal dari mana kayu yang berada di mobil tersebut dan dijelaskan kayu tersebut adalah kayu jenis Sono Keling milik Topik (DPO) yang berasal dari hutan Kawasan kemudian saksi Bayu Saputra menanyakan izin kayu tersebut dan saksi Yahman bin Kasiran tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan kayu tersebut. Saat itu terdakwa berhasil melarikan diri karena sedang buang air besar tetapi berhasil ditangkap di rumahnya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa kayu Jenis Sono Keling tersebut diangkut dari lokasi penebangan dengan menggunakan ojek lalu di pindahkan ke bak mobil, kemudian kayu tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saksi Yahman bin Kasiran ke Pulyang berada di bawah disekitar kebun karet PTPN VII way lima dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 BE 9546 AQ dimana terdakwa selaku sopir dan saksi Yahman bin Kasiran selaku

merugikan pemerintah maupun masyarakat. Di dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa Reko Cahyono Bin Basir melakukan perbuatan pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang bertempat di Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Dengan mengangkut kayu balok yang berjenis sono keling berukuran 2 meter sebanyak 16 batang. Kemudian di pindah dan diangkut menggunakan bak mobil. Bahwa UPTD taman hutan raya wan Abdurrahman tidak pernah mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut sudah melanggar ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan.

Bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Setiap perbuatan yang dilarang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ketika perbuatan yang dilakukan itu sudah melanggar ketentuan undang-undang. Maka aturan tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi. Agar tidak lagi yang melanggar peraturan, perlu penetapan hukuman yang tepat. Supaya dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar aturan. Kemudian menerapkan hukuman yang tepat berupa hukuman pokok ataupun hukuman yang sifatnya tambahan.

tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan masing-masing. Tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sering kita kenal dengan KUHP, sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam peraturan undang-undang yang sifatnya khusus, misalnya Undang-undang tindak pidana korupsi, UU Peradilan Anak dan Undang-undang khusus lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan hutan, tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin ini tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana *Illegal logging*. Yang dimaksud *Illegal logging* ini adalah segala pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, meliputi kegiatan menebang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan. Baik tujuannya untuk di jual maupun dimanfaatkan secara pribadi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor : 23/Pid.Sus-LH/2018/PN.Kla tentang pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Reko Cahyono Bin Basir, ada beberapa pertimbangan hakim, yaitu :

1. Menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan telah terpenuhi, maka

menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya bukti yang lain. Diperoleh fakta bahwa pada saat saksi Bayu Saputra dan Ris Trifelly yang merupakan anggota POLRI, sedang berpatroli melihat 1 (satu) mobil yang sedang berhenti dan dikendarai oleh terdakwa beserta saksi Yahman Bin Kasiran. Kemudian diadakanya pemeriksaan terhadap mobil tersebut, ditemukan kayu yang berjenis sono keling yang berukuran 2 meter dengan jumlah 16 batang yang berasal dari hutan kawasan. Namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin kepemilikan kayu tersebut. Kemudian dari pengakuan terdakwa membenarkan bahwa kayu jenis sono keling tersebut diangkut dari lokasi penebangan di kawasan hutan tanpa dilengkapi izin ataupun surat-surat dari pihak yang berwenang. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf d” terpenuhi.

membahas mengenai pidana denda, efektifitas pidana denda yang ada di indonesia ini sudah berjalan cukup lama. Bahkan pidana denda termasuk dalam pidana tertua. Pidana denda terdapat dalam pasal 10 KUHP. pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Mengingat tujuan pembedaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

Dari semua analisa diatas berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Namun dalam penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan masih kurang efektif dan kurang tepat sesuai perbuatannya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dapat diterapkan terhadap terdakwa.

